

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Oktober                      2024   1,13 % (Y-on-Y), -0,26 % (M-to-M)

Nopember                    2024   0,83 % (Y-on-Y), -0,19 % (M-to-M)

Desember                    2024   1,19 % (Y-on-Y), -0.82 % (M-to-M)

- Pada Oktober 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,13 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,33. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 2,02 persen dengan IHK sebesar 105,53 dan Deflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,02 persen dengan IHK sebesar 104,42.
- Pada November 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,83 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,53. Inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 2,25 persen dengan IHK sebesar 106,46 dan Deflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,54 persen dengan IHK sebesar 104,77..
  - Bulan Desember 2024 inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur inflasi tercatat sebesar 1,19 % sehingga termasuk 10 (sepuluh) Provinsi terbawa dengan inflasi terendah. Inflasi y-on-y November 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,61 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,47 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,23 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,26 persen; kelompok transportasi sebesar 0,38 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,18 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,07 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,25 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,89 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,74 persen pada November 2024.
  - Terjadi inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode Desember 2024 sebesar 0,82 persen. Dan juga terjadi inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode ini sebesar 1,19 persen. Inflasi y-on-y dan inflasi y-to-d pada Desember 2024 memiliki nilai yang sama
  - Mencermati perkembangan inflasi terkini dan beberapa indikator harga, pada bulan Januari 2025 Provinsi NTT inflasi Provinsi NTT diperkirakan didorong oleh beberapa faktor. Inflasi berpotensi didorong oleh komoditas beras, bawang merah, tomat, cabai merah dan emas perhiasan. Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dan jagung pakan masing-masing menjadi Rp6.500 dan Rp5.500 berdasarkan hasil rapat bersama Presiden, Menko Pangan, dan Bapanas. Hal ini berpotensi memicu spillover effect terhadap harga eceran yang harus dijaga. Secara umum, peningkatan curah hujan ke kategori tinggi dengan sifat hujan di atas normal berdasarkan prediksi BMKG, berpotensi menahan produksi komoditas hortikultura maupun tanaman pangan. Produksi bawang merah, cabai merah maupun padi di NTT dapat kembali melanjutkan penurunan. Dengan telah selesainya momen HBKN Nataru, maka insentif yang

diberikan oleh pemerintah pun akan berkurang untuk penerbangan domestik. Hal ini dapat memicu kenaikan pada tarif angkutan udara antar daerah di Provinsi NTT dan juga intra NTT. Kemudian, harga emas perhiasan juga diperkirakan tetap tinggi, sejalan dengan harga emas global di tengah dinamika ekonomi global yang dibayangi eskalasi tensi geopolitik. Meskipun demikian, penurunan harga daging ayam ras, telur ayam ras, daging babi, dan sirih dapat menjadi faktor penahan laju inflasi. Ketersediaan pasokan yang mumpuni serta telah berlalunya HBKN Nataru berpotensi menormalisasi kembali konsumsi masyarakat akan kebutuhan daging ayam dan telur. Kondisi ini juga berlaku kepada komoditas sirih sebagai komoditas yang erat budaya perayaan akhir tahun masyarakat NTT. Selain itu, ancaman kasus African Swine Fever (ASF) yang dapat menyerang hewan babi pada musim hujan dapat menurunkan harga daging babi di pasaran. Kemudian, diskon tarif dasar listrik sebesar 50% s.d. 28 Februari 2024 turut berpotensi menjadi faktor penahan inflasi.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Klasifikasi permasalahan :

### 1. Ketersediaan pasokan :

- Pola Inflasi NTT

Beras :

- Sebagian besar pasokan beras di Provinsi NTT masih harus didatangkan dari luar daerah seperti Sulsel, NTB, dan Jatim

Ikan-Ikanan

- Konsumsi ikan di NTT cukup tinggi sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi secara keseluruhan.

Hortikultura

- Komoditas hortikultura seperti tomat, cabai, dan bawang memberi andil inflasi.
- Komoditas hortikultura sayuran seperti kangkung, sawi, dan kangkung memberikan andil inflasi, dimana sebagian besar diproduksi oleh petani lokal NTT.

Daging Ayam :

- Komoditas Daging ayam dan Telur ayam turut memberi andil deflasi.

### 2. Keterjangkauan harga :

- Berdasarkan pola historis dalam 6 tahun terakhir, Provinsi NTT cenderung mengalami kelangkaan komoditas-komoditas tertentu pada akhir tahun (November — Desember) hingga awal tahun (Januari — Februari). Selain itu pada momen Ramadhan/Idulfitri dan Idul Adha, Provinsi NTT juga selalu mengalami hal yang sama. Sehingga Inflasi tertinggi dalam satu tahun cenderung terjadi pada periode Desember — Januari seiring dengan momen perayaan Natal dan Tahun baru.
- Komoditas yang sering kali menjadi faktor utama inflasi di NTT sebagian besar berasal

dari kelompok *Volatile Foods*, antara lain beras, daging dan telur ayam ras, bawang merah dan putih, cabai merah dan rawit, ikan kembung dan tongkol. Komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat, sehingga memiliki bobot yang besar terhadap perhitungan inflasi serta kelompok AP terutama angkutan udara

- permasalahan yang dihadapi antara lain produktivitas dan Indeks Pertanaman (IP) di NTT yang rendah di bawah nasional sehingga sebagian besar kebutuhan masih harus dipenuhi dari luar daerah.

### 3. Kelancaran distribusi :

- Pemetaan menggunakan *Global Neighboring Area* untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat ketergantungan berbeda terhadap inflasi NTT. Wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua memiliki dampak langsung terhadap inflasi di NTT. Sementara itu, wilayah lainnya memiliki dampak tidak langsung melalui perantara atau faktor lain.
- Tarif Angkutan Udara
  - Kondisi geografis NTT yang terdiri dari kepulauan membuat penerbangan menjadi moda transportasi utama intra provinsi
  - Maskapai yang beroperasi masih terbatas dan cenderung didominasi oleh satu maskapai.

### 4. Komunikasi efektif :

Adanya koordinasi dari berbagai *stakeholder* terkait tentang pentingnya pengendalian inflasi secara kontinyu namun perlu dioptimalkan.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya Pengendalian Inflasi oleh Provinsi NTT, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTT (TPID NTT) berupa kegiatan melakukan pengendalian Inflasi diantaranya:

1. **Selasa 1 Oktober 2024 : Zoom Meeting** RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri dan diikuti secara hybrid di Ruang Biro PAP, dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi NTT.
2. **Senin, 7 Oktober 2024** : Zoom Meeting RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri dan diikuti secara hybrid di Ruang Biro PAP, dipimpin oleh Plt Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi NTT.
3. **Senin, 14 Oktober 2024** : Zoom Meeting RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri dan diikuti secara hybrid di Ruang Biro PAP, dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi NTT.
4. **Jumat, 18 Oktober 2024** : Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Pelatihan Pengolahan Komoditas-komoditas Volatile Food di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang di pimpin oleh Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
5. **Senin, 21 Oktober 2024** : Zoom Meeting RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri dan diikuti secara hybrid di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi NTT, dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT.

**Selasa, 28 Oktober 2024** : Zoom Meeting RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang

6. dipimpin oleh Irjen Kemendagri Kemendagri dan diikuti secara hybrid di Ruang biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT.
7. **Senin 4 November 2024 : Zoom Meeting** RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti secara hybrid di Ruang Biro PAP, dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi NTT.
8. **Senin, 11 November 2024** : Zoom Meeting RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri dan diikuti secara hybrid di Ruang Biro PAP, dipimpin oleh Plt Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi NTT.
9. **Senin, 18 November 2024** : Zoom Meeting RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti secara hybrid di Ruang Biro PAP, dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi NTT.
10. **Senin, 25 November 2024** : Zoom Meeting RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti secara hybrid di Ruang Biro PAP, dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi NTT.
11. **Selasa 26 November 2024** Anggota TPID Provinsi NTT melakukan Sidak Pasar di pasar Oebobo Kota Kupang untuk mengecek harga komoditas – komoditas pemicu Inflasi menjelang HBKN Nataru dalam rangka pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT.
12. **Jumat, 29 November 2024** : Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan tema pengendalian inflasi menjelang HBKN Nataru di Kota Kupang dan Hilirisasi Komoditas Deflasi yang dikhususkan pada pengolahan Ikan yang di pimpin oleh Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
13. **Senin 2 Desember 2024 : Zoom Meeting** RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti secara hybrid di Ruang Rapat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi NTT.
14. **Senin, 9 Desember 2024** : Zoom Meeting RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI dan diikuti secara hybrid di Ruang Rapat Gubernur NTT, dipimpin oleh Pj Gubernur NTT dan diikuti oleh Forkopimda dan Anggota TPID Provinsi NTT.
15. **Senin, 12 Desember 2024** : Pelaksanaan High Level Meeting (HILM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT dalam Rangka Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi NTT secara hybrid di Ruang Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT, yang di Ikuti Oleh Forkopimda Provinsi NTT dan para Pj. Bupati dan Wakil Bupati serta yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dan menghasilkan rekomendasi Pengendalian Inflasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT.
16. **Senin, 16 Desember 2024** Zoom Meeting RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti secara hybrid di Ruang Biro PAP, dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi NTT.
17. **Senin, 23 Desember 2024** Zoom Meeting RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti secara hybrid di Ruang Biro PAP,

dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi NTT

18. **Senin, 30 Desember 2024** Zoom Meeting RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti secara hybrid di Ruang Biro PAP, dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi NTT.
19. **Senin, 30 Desember 2024** Anggota TPID Provinsi NTT melakukan Sidak Pasar di pasar Oebobo Kota Kupang untuk mengecek harga komoditas - komoditas pemicu Inflasi menjelang HBKN Nataru dalam rangka pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Berbagai kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi NTT dan TPID Kabupaten/Kota se NTT kurun waktu Januari 2024 s/d Desember 2024 tercatat perkembangan inflasi (*y-on-y*) Provinsi NTT berada di bawah rentang sasaran yaitu :

Bulan Januari	2024 Inflasi NTT 2,70 %,
Bulan Februari	2024 Inflasi NTT 3,01 %
Bulan Maret	2024 Inflasi NTT 1,92 %.
Bulan April	2024 Inflasi NTT 2,35 %
Bulan Mei	2024 Inflasi NTT 2,41 %
Bulan Juni	2024 Inflasi NTT 1,54 %
Bulan Juli	2024 Inflasi NTT 0,85 %
Bulan Agustus	2024 Inflasi NTT 1.22 %
Bulan September	2024 Inflasi NTT 1,07 %
Bulan Oktober	2024 Inflasi NTT 1,13 %
Bulan Nopember	2024 Inflasi NTT 0,83 %
Bulan Desember	2024 Inflasi NTT 1,19 %

Sehingga kegiatan-kegiatan seperti Sidak Pasar, Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah Bersubsidi dan Non Subsidi disarankan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan inflasi.

2. Prospek inflasi Provinsi NTT secara (*y-on-y*) pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan masih terkendali pada sekitar titik tengah kisaran target  $2,5 \pm 1$  %.
3. Inflasi pada komoditas *volatile food* diperkirakan terkendali pada sasaran 5,00 % (*y-on-y*) ditopang oleh program pengendalian inflasi jangka pendek dan menengah panjang.
4. Sepanjang Triwulan I s/d Triwulan IV 2024 telah terlaksana 624 *Event* GPM, Pasar Murah dan Operasi Pasar yang dilaksanakan oleh :
  - Pemda Provinsi NTT (GPM = 22 *Event* dan Pasar Murah = 7 *Event*)

Pemda Kabupaten/Kota (GPM = 63 *Event* dan Pasar Murah = 161 *Event*).

- Bulog se-Provinsi NTT (Operasi Pasar = 400 *Event*).

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan Pengendalian Inflasi di Provinsi NTT adalah melakukan strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Yang Efektif dan dirumuskan dalam 13 (tiga belas) butir rekomendasi (*High Level Meeting* (HLM) TPID tanggal 12 Desember 2024) sebagai berikut:

1. Mendorong **Gerakan Menanam Tanaman Cepat Panen** (berupa tanaman bahan makanan/hortikultura) untuk mendukung ketersediaan stok pangan dengan mengoptimalkan lahan pekarangan dan kebun masyarakat;
2. Pemanfaatan **Dana Desa yang tepat sasaran**, untuk mendukung Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok masyarakat yang ada di 3.137 Desa di Provinsi NTT dengan mengoptimalkan peran dan fungsi BUMDes;
3. Mendorong pemberian **subsidi transportasi** melalui APBD dalam rangka ketersediaan stok, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Mendorong penggunaan **Dana BTT (Bantuan Tidak Terduga)** sesuai kebutuhan apabila kondisi inflasi sudah di luar rentang sasaran  $2,5 \pm 1\%$ ;
5. Mendorong **Kerjasama Antar Daerah (KAD) Business to Business** dan *Government to Government* dalam pemenuhan kebutuhan pangan dari daerah Surplus ke daerah Defisit.
6. Bulog Provinsi NTT agar terus melaksanakan **penyerapan Beras Lokal** yang diproduksi oleh petani di NTT dengan harga yang memadai;
7. Meningkatkan **akses penyaluran Beras SPHP** yang dikelola Bulog, dengan memperbanyak Agen, Pengecer dan Kios Pangan;
8. Meningkatkan peran dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan **kerja kolaboratif seluruh anggota TPID** dan stakeholder terkait, sehingga terjalin komunikasi yang efektif;
9. Meningkatkan **akses keuangan bagi pelaku usaha** Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan melalui program Kredit Merdeka oleh Bank NTT, dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Lembaga Keuangan bukan Bank;
10. Mendorong **peran KADIN** Provinsi NTT sebagai mitra pelaku usaha dalam hal produksi dan pemasaran hasil panen;
11. Mendorong cetak lahan kering yang didukung ketersediaan embung untuk kebutuhan peningkatan produksi pangan;
12. Percepatan penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota se-NTT untuk Tahun 2025 sesuai ketentuan Perundang-undangan.
13. Menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian RI Nomor: B-243/SR.110/M/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 untuk pencapaian swasembada pangan maka, perlu mengidentifikasi kebutuhan fasilitasi irigasi antara lain,
14. Inventarisasi pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, dan normalisasi saluran;
15. Pembuatan/peninggian tanggul (polder), perbaikan pintu air, dam parit, embung;
16. Kebutuhan sumur dangkal dan sumur dalam di daerah lahan sawah tadah hujan;
17. Irigasi perpompaan/perpipaan.

▪